



KOKOH: Proyek pembangunan gedung bertingkat di Jalan Sultan Agung, Kota Jogja, kemarin (24/4). Sekitar 1500 permohonan PBG 2024 hingga sekarang belum terselesaikan.

Izin Persetujuan Bangunan Gedung Menggantung

Hasto Targetkan 1.500
Permohonan Rampung Tahun Ini

JOGIA - Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyoroti lambannya penanganan ribuan permohonan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Berdasarkan pemetaannya, terdapat sekitar 1.500 permohonan izin PBG yang belum terselesaikan sejak 2024.

Hasto mendorong permasalahan ini harus segera dituntaskan. Targetnya, paling tidak bisa selesai dalam 100 hari kerja.

"Kalau tidak mampu, ya maksimal akhir tahun ini, agar 2026 nanti pelayanan bisa berjalan secara *real time*," tegas Hasto, kemarin (24/4).

Dia menilai, banyaknya layanan perizinan yang belum selesai di Kota Jogja karena komunikasinya yang kurang bagus. Misal, karena

ada persyaratan yang belum lengkap. Namun tidak segera disampaikan oleh instansi terkait maupun ditanyakan oleh pemohon.

Hasto meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja bisa lebih proaktif. Yakni dengan memberitahu dan membina pemohon perizinan yang berkali-kali gagal melalui mal pelayanan publik (MPP).

"Kalau memang tidak bisa (diproses izin PBG), ya divonis tidak bisa jadi, selesai. Kalau saat ini kan menggantung," ujarnya.

Meskipun mendapatkan evaluasi, layanan di MPP dinilai sudah cukup bagus dan banyak inovasi. Dia pun berharap agar layanan tersebut bisa meningkatkan respon waktu dan proaktif dalam pelayanan.

Dia juga meminta, agar MPP mewujudkan pelayanan yang bersih dan jelas. Dalam artu, tidak ada

penyimpangan dan retribusi pembayaran juga harus sesuai aturan yang berlaku. Tidak terkecuali pula memaksimalkan pelayanan dengan etika ramah senyum, dengan logika dan empati.

"Karena banyak izin itu untuk usaha. Jangan menunda tumpukan 'utang' kita kepada masyarakat," tegasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja Umi Ahsanti membeberkan, 1.500 permohonan izin PBG yang belum selesai berdasarkan data di SIMBG. Dia akan mencermati permohonan PBG yang belum selesai.

Umi menyebut, ada beberapa alasan permohonan PBG tidak bisa diteruskan. Di antaranya karena permohonan ganda. Kemudian permohonan awal ada kekurangan namun saat melengkapi masyarakat mendaftar dengan

permohonan baru.

"Akan kami cermati lagi permohonan yang tidak bisa diteruskan karena beberapa alasan," katanya. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Jogja Budi Santosa menyampaikan, banyaknya perizinan yang "mandeg" karena pemohon tidak memenuhi syarat. Termasuk dalam hal permohonan perizinan PBG.

Menyikapi hal tersebut, pihaknya sudah membuka layanan terpadu klinik perizinan dan investasi yang bisa diakses secara *online* melalui aplikasi Jogja Smart Service maupun secara *offline* di MPP. Program tersebut diketahui merupakan salah satu *quick wins* DPMPTSP Kota Jogja.

"Harapan kami dengan klinik perizinan dan investasi masyarakat bisa menjadi tahu dan ketika masuk di aplikasi (perizinan) syarat-syaratnya bisa dipenuhi," jelasnya. (Inu/wia/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005